

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berbagai bangsa dan jenis serta berbagai karakter dengan kecerdasan dan ketajaman pikiran yang berbeda pula. Sebagian manusia sangat cerdas, berdisiplin, jujur, sabar, dan bertanggung jawab, namun sebagian lagi ada yang kurang cerdas, emosional/cepat marah, suka berbohong, indiscipliner dan tidak bertanggung jawab. Kondisi kodrat seperti itu merupakan salah satu sumber penyebab; mengapa tidak semua persoalan mendapat tanggapan yang sama dan penyelesaiannya juga berbeda.

Dalam lingkungan kehidupan organisasi kemasyarakatan, baik sosial, ekonomi maupun politik, upaya untuk mencapai sasaran dengan menggunakan kekerasan atau berdasarkan kekuatan otot belaka sudah bukan jamannya. Dalam menyelesaikan suatu perbedaan/pertentangan maupun perbedaan kepentingan diperlukan dialog dan musyawarah melalui lobi dan negosiasi, meskipun adakalanya berlangsung alot dan membutuhkan waktu relatif lama.

Dewasa ini upaya melobi bukan lagi monopoli dunia politik dan diplomasi, tetapi juga banyak dilakukan para pelaku bisnis, selebritis dan pihak-pihak lain termasuk PNS. Istilah Lobi yang berarti teras atau serambi ataupun ruang depan yang terdapat pada suatu bangunan atau hotel-hotel yang dijadikan sebagai tempat duduk tamu-tamu. Sambil duduk-duduk dan bertemu secara santai, seraya berbincang-bincang untuk membicarakan sesuatu mulai dari hal yang ringan-ringan sampai *educare: Jurnal Pendidikan dan Budaya*, kepada masalah politik dan pemerintahan dalam negeri bahkan luar negeri, baik dalam rangka pendekatan awal sebelum pelaksanaan negosiasi maupun berdiri sendiri untuk kepentingan lobi itu sendiri. Biasanya lobi-lobi dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka merancang sesuatu perundingan. Apabila lobi berjalan mulus diyakini akan menghasilkan perundingan yang sukses.

Lobi memiliki beberapa karakteristik yaitu bersifat informal dalam berbagai bentuk, pelakunya juga beragam, dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, tempat dan waktu fleksibel dengan pendekatan satu arah oleh pelobi. Ada beberapa cara untuk melakukan lobi baik yang legal maupun ilegal, secara terbuka maupun tertutup/rahasia, secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh: upaya penyuapan dapat dikategorikan sebagai lobi secara langsung, tertutup dan ilegal. Lobi semacam ini jelas melanggar hukum, namun karena bersifat tertutup/rahasia, agak sulit untuk

membuktikannya (contoh: kasus-kasus lobi pemenangan tender dengan pendekatan gula-gula/wanita, seperti yang sering diberitakan diberbagai mass media).¹

Dalam dunia politik dibutuhkan seperangkat keahlian untuk melakukan lobi politik dengan suatu pendekatan persuasif yang simpatik bahkan dapat mengalahklan konflik terbuka. Politik “*how to win the war without the battle*” ini sangat penting dan mengurangi resiko perang yang selalu berakibat fatal dan vital bagi eksistensi kedua pihak yang bertikai, bagaikan “kalah jadi abu, menang jadi arang”. Pemilu juga dapat dikategorikan sebagai suatu medan pertempuran politik.²

Ketertarikan penulis terhadap fenomena politik yang terjadi didalam internal partai golkar beberapa waktu lalu pada Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar yang berlangsung di hotel Imperial Aryaduta dalam proses penentuan ketua umum DPD I. Tokoh Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin saling mengklaim akan memperoleh dukungan suara dari DPD II Partai Golkar pada Musyawarah Daerah (Musyawarah Daerah) Golkar Sulsel pada 14 Nopember 2009. Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulsel menyatakan, pihaknya telah memperoleh suara dari sejumlah DPD II Golkar yang cukup intens meminta dirinya maju

¹ Ibnuhasan. Diplomasi, Lobi dan Negosiasi. (<http://zoffmuttaqien.blogspot.com/2011/01/diplomasi-lobi-dan-negosiasi.html?zx=1e663be3a969e99b>)

² Syamsulbahrun. Membangun Koalisi Antara Lobi Dan Hobi Politik. (<http://syamsulbahrum.web.id/?p=1432>)

sebagai kandidat Ketua DPD I Golkar pada Musyawarah Daerah mendatang. Ilham juga terus bergerilya. Seperti Syahrul, Ilham juga terus membangun komunikasi dengan DPD II. Sebagai Walikota Makassar pada saat itu dan ketua DPD I Partai Golkar tetap yakin bisa memenangkan pertarungan Musa Golkar.

Kubu yang akan bersaing dalam Musda yaitu kubu Syahrul Yasin Limpo dan kubu Ilham Arief Sirajuddin memperebutkan posisi ketua Golkar Sulawesi Selatan kini aktif melakukan lobi ke pengurus DPD II kabupaten/kota untuk mencari dukungan menjelang musda berlangsung. Selain berkomunikasi dengan DPD II, gubernur Sulsel itu juga akan melakukan konsolidasi. Syahrul akan mengumpulkan pengurus Kosgoro, Himpunan Pengusaha Kosgoro, Barisan Muda Kosgoro, Hima Kosgoro, Perempuan Kosgoro, Badan Hukum Kosgoro, ketua DPD Golkar, DPC Kosgoro, serta SYL Community. Untuk mendapatkan dukungan pada Musda Golkar Sulsel.

Dukungan kepada kedua calon Ketua Golkar Sulsel tersebut mulai mengemuka di kalangan pengurus dan kader, sehingga suasana di tubuh parpol ini mulai memanas. Ilham Arief Sirajuddin mengklaim dirinya telah didukung 14 DPD II kabupaten/kota dan organisasi kader seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan mengklaim memiliki 50 persen suara pada

Musda nanti³. Sedangkan Syahrul menyatakan, pihaknya telah memperoleh suara dari sejumlah DPD II Golkar yang cukup intens meminta dirinya maju sebagai kandidat Ketua DPD I Golkar pada musda

Pemilihan ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin adalah elit partai Golkar, sebagai seorang elit yang mampu menduduki jabatan tertinggi dalam tubuh partai Golkar Syahrul Yasin Limpo yang terpilih secara aklamasi merupakan sosok figur yang memiliki kekuatan tidak hanya dalam partai Golkar saja tetapi juga dalam ruang lingkup pemerintahan karena Syahrul Yasin Limpo juga saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, jadi dengan kekuasaan dan kekuatan yang ia miliki maka bisa membawa partai Golkar sebagai lumbung suara pada pemilu 2014 nanti.

Dalam musyawarah daerah partai Golkar Sulawesi Selatan ada dua mekanisme yang digunakan dalam menentukan ketua DPD I partai Golkar ada dua yaitu mekanisme *voting* dan aklamasi, dimana Syahrul Yasin Limpo menginginkan mekanisme aklamasi sedangkan Ilham Arief Sirajuddin menginginkan mekanisme *voting*. Tetapi semua keputusan ada di tangan para pemegang hak suara yaitu ketua DPP, para ketua DPD II se Sulawesi Selatan, organisasi yang mendirikan, organisasi yang didirikan, dan

³ <http://www.lebihcepat.com/politik/37-politik/8258-rebut-ketua-golkar-tidak-menjamin-menangkan-pilgub.html>

organisasi sayap. Pemilihan secara musyawarah untuk mufakat diusulkan dalam peraturan dan tata tertib pemilihan ketua partai dengan melakukan penambahan pada pasal 34. Jika musyawarah untuk mufakat tidak memungkinkan untuk dilakukan maka dilakukan pemungutan suara.⁴ Setelah melalui proses yang ketat diputuskan yang menjadi ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan untuk periode 2009-2014 adalah Syahrul Yasin Limpo secara aklamasi oleh ketua DPP partai Golkar. Dimana dalam penentuan aklamasi ini ditentukan oleh pemegang hak suara yaitu dari ketua DPP, para ketua DPD II partai Golkar se Sulawesi Selatan, organisasi yang mendirikan, organisasi yang didirikan, dan organisasi sayap. Semua memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam penentuan mekanisme aklamasi sehingga hasil keputusan dari pemegang hak suara tidak memihak dan berdasar kepada aturan dan tata tertib yang ada

Pada saat pembukaan Musyawarah Daerah, Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie telah menginstruksikan agar pemilihan dilakukan melalui mufakat. Aburizal, meminta agar seluruh kandidat menghilangkan rasa ego demi kepentingan Golkar mendatang. Proses pemilihan Ketua Golkar Sulsel yang digelar di Hotel Imperial Aryaduta Makassar berlangsung alot. Hingga pada akhirnya di ambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP),

⁴Headlines | Mon, Nov 16, 2009 at 02:22 | Jakarta, matanews.com

dengan kesepakatan, Sahrul menjadi Ketua dan Ilham tetap masuk dalam kepengurusan.⁵

Banyak kalangan menilai proses penentuan ketua umum Partai Golkar Sulsel kurang fair karena tidak dilakukan pemilihan, penetapan hanya dilakukan secara aklamasi dan tidak demokratis. Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana proses komunikasi politik yang dilakukan oleh sahrul yasin limpo dan timnya ketika memenangkan Musyawarah Daerah DPD I Golkar secara aklamasi.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan cakupan masalah yang akan diteliti mengenai Lobi Politik Syahrul Yasin Limpo dalam Musyawarah Daerah DPD I Golkar, maka penulis membatasinya pada persoalan “ Bagaimana proses Lobi Politik tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo dalam memenangkan Musyawarah Daerah DPD I Golkar ” ?

⁵ http://cangkang.vivanews.com/timnas/news/read/105886-syahrul_yasin_limpo_pimpin_golkar_sulsel

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan :

- a. Mendeskripsikan Lobi politik yang dilakukan Tim Pemenangan Syahrul Yasin Limpo dalam memenangkan Musyawarah Daerah DPD I Golkar.
- b. Mendeskripsikan pola komunikasi politik elit politik dalam Musyawarah Daerah DPD I Golkar.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Manfaat Teoritis :

- a. Mengetahui pola komunikasi politik elit partai Golkar dalam Musyawarah Daerah DPD I Golkar.
- b. Menunjukkan secara ilmiah mengenai Lobi politik kemenangan Syahrul Yasin Limpo dalam Musyawarah Daerah DPD 1 Golkar.
- c. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

2.2 Manfaat Praktis :

- a. Untuk memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami konsep komunikasi politik secara praktis terlebih khusus pada Lobi politik dalam Musyawarah Daerah DPD 1 Golkar.
- b. Untuk memberikan informasi sebagai bahan perbandingan dalam kajian politik praktis.
- c. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kekuasaan

Politik dipandang sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti sempit menurut Robert A. Dahl, adalah kekuasaan dapat digambarkan seperti A memiliki kekuasaan atas B, sehingga B mengikuti kehendak A.⁶ Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginan pelaku.⁷ Ramlan Surbakti memandang kekuasaan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi.⁸

Sehingga dapat dikatakan kekuasaan adalah suatu tindakan individu ataupun kelompok untuk membuat orang lain mengikuti kehendaknya dan mematuhi apa yang diinginkannya dan menjadi dominan atas orang lain.

Konsep kekuasaan melahirkan bentuk-bentuk kekuasaan yaitu :

1. *Coercive power*, yang berkuasa mampu menghukum seseorang yang tidak melakukan perintah.

⁶ <http://www.anneahira.com/kekuasaan-menurut-para-ahli.htm>

⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta; Gramedia pustaka Utama, 2002) hal 35.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu politik* (Jakarta; Gramedia widiasarana, 1999) hal 6.

2. *Reward power*, yang diberi order melakukan sesuatu dapat tunduk bila diberi imbalan.
3. *Expert power*, seseorang yang berkuasa memang memiliki keahlian luar biasa dalam bidangnya.
4. *Legitimate power*, seseorang akan yang berkuasa akan menuntut bawahan dan pengikutnya agar taat padanya.
5. *Referent power*, sang penguasa memiliki kharisma sehingga para pengikutya ingin menjadi seperti dia dan melakukan apa saja untuknya.

Kekuasaan seseorang didapat melalui :

1. Kedudukan : misal komandan dan anak buah, menteri dan pegawai
2. Kekayaan : misal orang kaya mampu mendikte penguasa
3. kepercayaan atau agama : ketokohnya dipatuhi masyarakat
4. hubungan kerabat : misal ibu/bapak terhadap anaknya
5. kepandaian : misal saran-sarannya yang diterima penguasa
6. ketrampilan: misal adanya keahlian bisa membuat kebijakan

Legitimasi kekuasaan berasal dari :

1. keyakinan anggota masyarakat karena asas dan prosedurnya sudah diterima secara luas di masyarakat,
2. konsesus mengenai dasar dan tujuan masyarakat.

Siapa yang mempunyai kekuasaan, biasanya dihubungkan dengan sistem dan struktur sosial dan politik yang ada di suatu masyarakat. Gaetano Mosca melukiskan distribusi kekuasaan dalam masyarakat terbagi atas dua kelas yang menonjol. Pertama, kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah sesuai aturan yang berlaku.⁹

B. Teori Komunikasi Politik

Dalam memahami dan mendalami komunikasi politik, perlu lebih dulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi pengertian, uraian, unsur, dan fungsi dari komunikasi politik. Para pakar ilmu politik dan pakar ilmu komunikasi berupaya untuk memberikan suatu pemahaman tentang apa itu komunikasi politik. Sulit kiranya untuk menstandarisasi satu pengertian yang dapat memenuhi semua disiplin ilmu, namun para pakar di

⁹ Ibid. hal 75

dalam merumuskan suatu pengertian telah berupaya secara maksimal sebagai sumbangan (kontribusi) yang sangat berharga yang dapat memperkaya rujukan dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi. Proses komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampakkan identitas keilmuan, baik sebagai ilmu murni (pure science) yang bersifat ideal, maupun sebagai ilmu terapan (applied science) yang berada dalam dunia empiris.

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin “*communicare*” yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Menurut kerangka Harold Lasswell komunikasi adalah “*who say what, in wich channel, to whom, with what efek.*”¹⁰ Menurut Carl I Hoveland: proses dimana individu mentransferkan stimulus untuk mengubah perilaku yang lain. Sedangkan Sarah Trenholm dan Arthur Jensen, komunikasi suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan ke pada penerima melalui berbagai saluran.¹¹

Politik berasal dari bahasa Yunani “*Polis*” dan “*Taia*”. Polis berarti Negara (kota), dan Taia berarti urusan sehingga dapat dikatakan politik merupakan urusan yang mengenai kenegaraan. Dalam proses politik akan

¹⁰ Riswandi. *Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 5

¹¹ Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal 6

selalu terjadi komunikasi politik. Menurut Gabriel Almond komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.¹² Sedangkan menurut Rush dan Althorf komunikasi politik adalah pemberian informasi yang relevan secara politis dalam suatu sistem politik.¹³ Adapun Definisi lain komunikasi politik adalah seluruh proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan, dan lainnya) yang dilakukan oleh para partisipan dalam kerangka kegiatan-kegiatan politik yang terlembaga.

Berdasarkan pengertian diatas maka rumusan pengertian komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian tujuan politik. Secara sederhana, komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.¹⁴ Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah.

¹²AsmRomli. Pengertian Komunikasi Politik. (<http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/>)

¹³ Asep. Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia* (Bandung:RosdaKarya,2006),hal.27

¹⁴ DRS. Rahman, MM. Sistem Politik Indonesia. (<http://dt.tp.ac.id/doc/bahan+ajar+sistem+politik+indonesia>)

Menurut Drs. Sumarno, unsur komunikasi politik memiliki dua unsur yaitu: Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Suprastruktur dan Unsur komunikasi politik dalam Lembaga Infrastruktur. Dua unsur tersebut akan diuraikan lebih lanjut.¹⁵

1. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Suprastruktur.

Dalam unsur ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, dari tiga kelompok tersebut terdiri dari :

- a. Elit politik
- b. Elit militer
- c. Teknokrat
- d. Professional Group

2. Unsur komunikasi politik dalam Lembaga Infrastruktur

Dalam unsur ini terdiri dari: Partai politik, Interest group, dan Pressure group.

Komunikasi politik diperlukan aktor untuk menyampaikan pesan-pesan politik dalam suatu sistem politik, aktor ini disebut dengan komunikator politik.

¹⁵ <http://chairulums.wordpress.com/2009/07/01/komunikasi-politik-power-dan-authority/>

Menurut Leonard W Dob, komunikator politik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:¹⁶

1. Politikus sebagai komunikator politik

Politikus adalah orang yang memiliki otoritas untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok, pesan-pesannya mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Namun demikian ada juga politikus yang sebagai ideology yang aktifitasnya membuat kebijakan yang luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

2. Komunikator Profesional dalam politik

Menurut James Carey, komunikator professional adalah orang yang menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas dengan khalayak umum secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas pada tingkat struktur sosial yang sama.

3. Aktivis atau komunikator paruh waktu (*part time*)

Komunikator ini adalah orang yang banyak cukup terlibat dalam kegiatan politik tetapi tidak menjadikan sebagai suatu kekuatan politik.

¹⁶ <http://chairulums.wordpress.com/2009/07/01/komunikasi-politik-power-dan-authority/>

Pola-pola Komunikasi Politik terdiri dari:

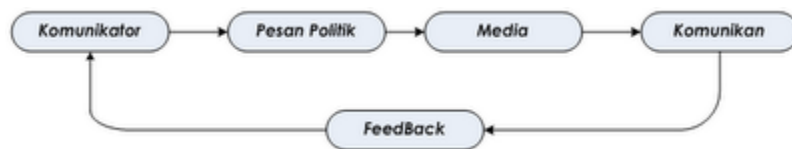
1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)
3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)
4. Pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).

Komunikator dalam proses komunikasi politik dapat diposisikan oleh beragam pihak. Parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, warganegara, presiden, menteri, pengamat politik, dan lain sebagainya. Mereka menjadi komunikator jika menjadi partisipan yang menyampaikan pesan-pesan politik, dan berubah menjadi komunikan jika mereka berposisi sebagai penerima. Komunikan dapat saja membelokkan pemahaman atas apa yang disampaikan komunikator. Misalnya, ketika pemerintahan SBY memberlakukan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan uang bantuan, sehingga dapat langsung dirasakan penerima. Ini ditanggapi berbeda oleh lawan-lawan politik dan warganegara yang kontra kebijakan tersebut, yang diwakili dengan

pernyataan “pemerintah Cuma mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan mengurangi angka kemiskinan” dan sejenisnya.

Skema Kerja Komunikasi Politik

Skema berguna untuk melakukan analisis atas proses komunikasi politik yang nanti akan dipelajari.¹⁷



- Komunikator = Partisipan yang menyampaikan informasi politik.
- Pesan Politik = Informasi, fakta, opini, keyakinan politik
- Media = Wadah (medium) yang digunakan untuk menyampaikan pesan (misalnya surat kabar, orasi, konperensi pers, televisi, internet, Demonstrasi, polling, radio)
- Komunikan = Partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator

¹⁷ Seta basri. *Komunikasi politik* (<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/komunikasi-politik.html>).

- *FeedBack* = Tanggapan dari Komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator.

Secara operasional, komunikasi politik dapat dinyatakan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu hingga memberikan efek (*feedback*).

C. Lobi Politik

Melakukan lobi dan negosiasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip, strategi, teknik, dan taktik, esensi dan fungsinya, oleh karena itu disebut sebagai suatu konsep.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang.¹⁸

¹⁸ <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

Sehingga definisi Lobi dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Negosiasi (*Negotiation*) dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Negosiasi” memiliki dua arti, yaitu:¹⁹

- 1) Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
- 2) Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dirumuskan, bahwa negosiasi adalah suatu proses perundingan antara para pihak yang berselisih atau berbeda pendapat tentang sesuatu permasalahan.

¹⁹ <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

Walaupun bentuknya berbeda, namun esensi lobi dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai sesuatu target (*objective*) tertentu. Lobi-lobi atau negosiasi harus diperankan oleh Pelobi (*Lobbyist*) yang mahir dan mempunyai kemampuan berkomunikasi yang tinggi (komunikabilitas). Hanya saja negosiasi merupakan suatu proses resmi atau formal, sedangkan “Lobi” merupakan bagian dari Negosiasi atau dapat pula dikatakan sebagai awal dari suatu proses Negosiasi.

Di luar negosiasi, ada aktivitas lain dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi. Tujuan aktivitas ini adalah agar satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan pihak lain. Aktivitas ini dikenal dengan istilah *lobbying*. *Lobbying* merupakan bagian dari proses negosiasi yang tidak terpisahkan. Karena untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi, me-lobby ini ternyata lebih efektif meskipun terkadang cara yang mereka lakukan tidak bermoral.²⁰

Pelobi adalah seseorang yang memiliki seni dan kemampuan membujuk orang lain agar mau mengikuti keinginannya. Pengertian keinginan disini adalah kepentingan seseorang atau suatu organisasi. Bisa kepentingan presiden, menteri, pebisnis, politisi, dan bisa untuk kepentingan pemerintah, perusahaan, parpol, organisasi sosial, perorangan dsb. Secara

²⁰ Ibnuhasan. Diplomasi, Lobi dan Negosiasi. (<http://zoffmuttaqien.blogspot.com/2011/01/diplomasi-lobi-dan-negosiasi.html?zx=1e663be3a969e99b>)

tradisional pelobi menyajikan isi pesan yang menjadi kepentingan kliennya kepada para penentu kebijakan tertentu atau calon mitra kerjasama. Di Indonesia, dalam pelaksanaannya, posisi legal dari seorang pelobi masih belum jelas baik dilihat dari kualifikasi maupun dari sertifikasinya. Sementara di Amerika Serikat profesi ini dilindungi oleh undang-undang. Regulasi yang menjadi landasan profesi pelobi, terdapat dalam *Federal Regulation of Lobbying Act of 1946*. Lalu diperkuat dengan *The Lobby Disclosure Act of 1995*, yang efektif berlaku sejak 1996. Produk hukum ini memayungi mereka-mereka yang berprofesi sebagai pelobi.

Legal atau belum legalnya status, yang jelas peran pelobi di semua negara sangatlah penting. Mulai dari aspek dan lingkup permasalahan yang sederhana sampai yang rumit, peran pelobi tidak bisa diabaikan. Misalnya dalam dunia bisnis, asosiasi pengusaha membutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu menstimulus perusahaan meningkatkan kinerja bisnisnya. Misalnya tentang subsidi harga input, harga minyak, pengelolaan hutan, perpajakan, dsb. Dalam hal ini peran pelobi adalah melakukan pendekatan ke pejabat pemerintah dan anggota parlemen yang berkait dengan isi pesan para kliennya. Jalurnya macam-macam yakni bisa langsung atau tidak langsung. Bergantung pada tujuan dan sasarannya maka para pelobi dapat melakukan lobi dengan jalur Langsung, Sosial, Koalisi, dan jalur Akar Rumput.

1. Jalur Langsung, melakukan praktek lobi langsung dengan cara menyajikan isi pesan dari klien di hadapan pengambil keputusan atau mitra kerjasama. Biasanya dilakukan secara formal dalam suatu pertemuan. Pelobi berusaha memengaruhi sasaran untuk memahami dan bersedia memenuhi keinginannya. Diskusi tidak cukup dilakukan hanya sekali saja tetapi berulang-ulang hingga tercapai kesepakatan.
2. Jalur Sosial, dalam proses melobi dikenal adanya jalur tidak langsung lewat kegiatan santap bisnis, pesta, dan olahraga bersama. Tujuannya membangun suasana persahabatan. Selain itu pelobi dapat menggunakan alat-alat media seperti telepon dan email pribadi. Disitu secara informal dibicarakan kehendak klien kepada para pengambil keputusan. Dengan suasana rileks dan bersahabat diharapkan para pengambil keputusan bersedia untuk memenuhi keinginan pelobi.
3. Jalur Koalisi, di hampir semua negara jalur ini biasanya dipakai dalam koalisi politik menghadapi suatu pemilihan presiden, ketua parlemen, dsb. Tawar menawar pembagian kekuasaan juga dibahas dalam lobi ini. Bergantung pada platform dan kepentingannya koalisi bisa berdimensi waktu menengah atau hanya temporer. Dalam hal isu non-politik, bisa jadi ada kerjasama antarorganisasi untuk memperjuangkan sesuatu. Para pelobi dari tiap organisasi bergabung

dalam suatu koalisi untuk membahas masalah yang menyangkut kepentingan mereka.

4. Jalur Akar Rumput ; untuk memperjuangkan sesuatu, misalnya tentang kebijakan harga BBM, masalah lingkungan, kemiskinan, pendidikan, dsb maka lobi bisa dilakukan lewat organisasi atau kelompok penekan. Mereka melakukan lobi di tingkat pejabat pemerintah dan parlemen.

Kriteria pelobi hebat dan bermartabat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Disamping memiliki kecerdasan intelektual juga kecerdasan emosional dan spiritual. Cerdas, rendah hati, dan ramah tamah.
2. Memahami apa isi pesan dari klien yang akan dibahas dengan pejabat pengambil keputusan atau dengan mitra kerjasama.
3. Trampil dalam berkomunikasi personal dan lintaspersonal serta memahami budaya lawan bicaranya. Piawai dalam bersimpati dan berempati. Mampu membangun suasana persahabatan yang hangat.
4. Tidak mudah menyerah apabila ada tanda-tanda penolakan dari lawan bicaranya. Namun di sisi lain tidak mau mengorbankan harga dirinya demi kesepakatan semata.
5. Mampu menghindari dan menolak permintaan pihak khalayak sasaran yang mengandung pelanggaran hukum dan a-susila. Prinsipnya

adalah menegakkan asas “win-win solution and result” dalam suasana bersih.

Lobi melobi adalah sebagai proses komunikasi. Karena itu pihak yang terlibat, khususnya pelobi haruslah mampu membangun interaksi positif. Hal itu bisa berlangsung dengan lancar apabila pelobi dan khalayak sasaran memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, isi pesan yang jelas, jauh dari kebisingan psikologis, dijalankan dengan cara legal, dan dukungan media komunikasi. Pelobi yang mampu menjalani proses komunikasi seperti itu termasuk hebat. Hal ini antara lain dicirikan oleh pergaulan yang luas. Namun idealnya pelobi hebat itu harus disertai dengan karakter integritas personal (martabat) yang tinggi. Yakni yang tidak mudah terjebak pada rayuan materi atau janji-janji jabatan manis tetapi ternyata mengandung sisi *moral hazard*.

D. Skema Pikir



Dalam proses lobi politik dalam Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar, Elit politik dalam partai yang melakukan negosiasi dengan seluruh anggota Partai lainnya yang memiliki hak suara. Elit politik ini bertindak sebagai komunikator ketika melobi para peserta Musyawarah Daerah DPD I yang notabene pengurus Partai Golkar ditingkat II dan sesekali bertindak sebagai komunikan ketika berhubungan dengan pengurus partai ditingkatan DPP, dari lobi politik yang dilakukan oleh tim Sahrul Yasin Limbon sehingga pertarungan untuk menempati posisi ketua partai terealisasikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan Locus penelitian di DPD I Golkar Sulsel. Dimana merupakan tempat pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD I Golkar yang telah berlalu dan Syahrul Yasin Limpo terpilih sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel.

B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian

Dasar dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dikarenakan dalam metode kualitatif terdapat beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi di dalam proses lobi politik.

Tipe penelitian ini adalah deskripsi analisis. Deskripsi analisis adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai

fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain.

Penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Lobi politik yang dilakukan tim pemenang Syahrul Yasin Limpo dalam Musyawarah Daerah DPD I Golkar.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Sehingga dapat dikatakan data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke daerah penelitian yakni sekretariat DPD I Partai Golkar Sulesl untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan data-data seperti, lobi politik yang

dilakukan tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arif Sirajuddin dalam Musyawarah Daerah DPD I Golkar.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian penulis juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran mengenai Lobi politik. Serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban.²¹

²¹ Moleong.Lexy , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 186

Salah satu varian dari teknik wawancara adalah wawancara mendalam (*deep interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah yang diangkat.

Tabel. 1
Narasumber Penelitian

Narasumber	Jabatan
Arfandi Idris	Sekretaris umum DPD I Golkar Sulsel.
Mahyanto Masda	Biro Hukum dan Ham Partai Golkar Sulsel
Imam Mujahid Fahmi	Ketua tim pemenang Syahrul Yasin Limpo.
Rahma Pina	Ketua Tim pemenang Ilham Arief Sirajuddin
A.S Kambi	Redaktur bidang politik Tribun Timur
Muh. Zain Katoe	Ketua DPD II Pare-pare
Sugali	Juru bicara tim pemenang Ilham Arief Sirajuddin

b. Dokumen/Arsip

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

E. Teknik Analisa

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai konflik kepentingan dan dampak dari rankap jabatan yang terjadi. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

²² Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kulaitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1998) hal: 4

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan peneliti dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti. Dalam tahapan ini penulis melakukan pemilihan beberapa data didasarkan kepentingan penulisan sehingga didapatkan pemisahan data yang penting dengan yang kurang penting. Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.

2. Sajian data

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar. Penyajian data tidak terpisahkan dari analisis justru penyajian data akan menentukan suatu analisa.

Pada tahap penyajian data penulis mengelompokan data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).

Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami berbagai hal yang terjadi dalam Musyawarah Daerah DPD I Golkar Sulsel, semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai lobi politik Syahrul Yasin Limpo dalam memenangkan Musyawarah Daerah DPD I Golkar.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Berbagai hal yang ditemui dalam proses pengumpulan data mengenai lobi politik Syahrul Yasin Limpo dalam memenangkan Musyawarah Daerah DPD I Golkar, akan penulis catat dan diverifikasi. Hal yang harus dilakukan pada penarikan kesimpulan akhir adalah mendiskusikan cara untuk mengembangkan apa yang disebut consensus subjektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.

Pada bulan Oktober 1964 terbentuk sebuah panitia yang terdiri dari anggota Gerakan Militer Pelajar, kelompok cendekiawan, dan militer. Panitia ini bertujuan untuk mempersiapkan “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan”. Pada 5 Agustus 1964, Presiden mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang berisi tentang syarat organisasi-organisasi yang boleh menjadi anggota dari Front Nasional. Penpres ini mempersulit organisasi-organisasi tersebut untuk menjadi anggota Front Nasional.²³ Pada 15 Oktober 1964, lima orang anggota Front Nasional dari Golongan Karya mengeluarkan sebuah

²³ Imam Pratignyo, *Ungkapan Sejarah Lahirnya Golkar*, (Jakarta: Yayasan Bhakti, 1984), hlm. 91.

undangan kepada semua organisasi yang dimaksudkan oleh Penpres No. 193/1964²⁴ untuk membicarakan keanggotaan mereka di dalam Front Nasional. Pertemuan itu diselenggarakan pada jam 9.00 pagi, 20 Oktober 1964.

Pada tengah malam 19 Oktober 1964, panitia yang menyusun “Piagam Pernyataan Dasar Karyawan” dan wakil-wakil dari 35 organisasi non-afiliasi berkumpul bersama menandatangani piagam. Kemudian pada pukul 12 siang hari, 20 Oktober, panitia pelaksana Sekber Golkar akhirnya terbentuk. Panitia ini diketuai oleh Kolonel Djuhartono, kemudian empat wakil ketua, masing-masing adalah Imam Pratigny (NU), J. K. Tumakaka (pernah menjadi pemimpin PNI), Djamin Gintings (militer), dan S. Sukowati (Hankam). Berikutnya Dr. Amino Gondoutomo bertindak sebagai Sekretaris Jenderal, dan Sutomo Gondowongso SH sebagai wakil sekretaris.²⁵ Akhirnya, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau yang disingkat sebagai Sekber Golkar resmi berdiri. Organisasi ini dimaksudkan sebagai Badan Kerjasama (BKS) antara militer dan kelompok sipil guna menghadapi pertarungan politik dengan partai-partai politik khususnya PKI.

²⁴ Penpres No. 193/1964 ini berisi mengenai syarat organisasi yang dapat menjadi anggota dari Front Nasional. Syarat-syarat tersebut antara lain; seasas dengan Front Nasional, berafiliasi dengan salah satu partai. Sementara itu, di kalangan Golongan Karya non afiliasi, penpres ini disebut penpres maut. Ibid.

²⁵ Suryadinata, op.cit, hlm. 15.

Kendatipun diawal pendirian (sesuatu yang wajar dialami oleh organisasi-organisasi yang baru berdiri), Sekber Golkar ini kurang efektif,²⁶ tetapi sebuah embrio mesin politik militer yang akan digunakan sebagai alat untuk mendominasi kehidupan sosial, budaya, politik bahkan ekonomi Indonesia telah berhasil dibangun dan dikembangkan. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Menjelang Pemilu tahun 1971 Sekber Golkar mampu memerankan diri sebagai simbol modernisasi dengan wacana-wacana pembangunan ekonomi dan satu-satunya alternatif untuk kemajuan Indonesia. Kekuatan sosial politik ini dipromosikan kepada masyarakat sebagai kekuatan yang lain sama sekali dari partai-partai politik yang ada. Kalau dalam Pemerintahan Orde Lama gemuruh politik sangat terasa dalam kehidupan masyarakat dan yang kedengaran setiap harinya hanya jargon-jargon politik, sementara ekonomi tidak dibenahi secara menyeluruh, maka Pemerintahan Soeharto yang menggantikannya mengubah orientasi pembangunan ke arah ekonomi.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987,

²⁶ Ibid, hlm. 16.

1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya di masa pemerintahan Soeharto.

Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris. Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP. Namun

pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti.

Tabel. 2
Ketua Umum Golkar

Nama	Periode Jabatan
Djuhartono	1964-1969
Suprpto Sukowati	1969-1973
Amir Moertono	1973-1983
Sudharmono	1983-1988
Wahono	1988-1993
Harmoko	1993-1998
Akbar Tanjung	1998-2004
Yusuf Kalla	2004-2009
Aburizal Bakrie	2009-sekarang

Sumber: www.golkar.co.id/tentang/sejarah

1. Perspektif dan program partai

Partai Golkar mencoba memantapkan doktrin dan program perjuangannya dalam sebuah kerangka yang mereka sebut sebagai "*paradigma baru*". Berikut adalah kerangka pandangan dan program seperti yang disebutkan dalam dokumen-dokumen partai Golkar.

a). Asas

Golkar mempunyai 5 asas dalam berpartai politik yaitu :

1. Asas kepemimpinan Pancasila
2. Asas demokrasi Pancasila
3. Asas keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi/kepemimpinan golongan
4. Asas kekeluargaan dan gotong royong
5. Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan

b). Tujuan Partai

- Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
- Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan hak asasi manusia²⁷.

2. Platform

Platform yang dimaksudkan di sini adalah landasan tempat berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan arah dari mana dan ke mana perjuangan Partai Golkar hendak menuju. Platform merupakan sikap dasar yang merupakan kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran historis Partai Golkar dalam menyertai bangsa membangun masa depan.

Pertama, Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari pijakan ini maka Partai Golkar berwawasan kebangsaan yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah satu dan menyatu.

Kedua, Partai Golkar adalah partai majemuk (pluralis), dalam artian Partai yang menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Bagi Golkar kemajemukan adalah anugerah Tuhan yang membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan mempesona yang berbudi luhur dalam

²⁷ Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009 “ Suara Rakyat Suara Golkar “ Hal 82. Sekertariat Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2009.

semboyan Bhineka Tunggal Ika. Komitmen ini akan dipertahankan oleh partai Golkar sepanjang masa.

Ketiga, Golkar adalah partai yang berkomitmen pada demokrasi. Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila. Golkar baru menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan yang memperkuat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Keempat, Golkar adalah partai yang berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan nasional. Peningkatan kesejahteraan itu diwujudkan antara lain dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh. Dengan sikap ini Golkar mempertegas keberpihakan pada rakyat.

Kelima, Golkar adalah partai yang berkomitmen pada penegakan hukum, keadilan dan hak-hak manusia. Sebagai partai politik yang hidup di negara yang berdasarkan hukum, maka Golkar senantiasa mengupayakan supremasi hukum di segala bidang.

Keenam, Golkar adalah partai yang senantiasa mendasarkan gerak langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas berdasarkan ajaran agama. Etika adalah moralitas dan saripati agama serta buah dari keberagaman itu sendiri. Dengan komitmen ini Golkar menempatkan keimanan dan ketakwaan

sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang demikian maka agama memiliki fungsi motivatif, inspiratif, dan sublimatif.

Ketujuh, Golkar adalah partai dalam setiap gerak langkahnya senantiasa berpijak pada wawasan pembaharuan dan pembangunan yang telah menjadi sikap dasar Golkar sejak kelahirannya, bahkan menjadi salah satu butir dari nilai-nilai dasar Golkar seperti yang tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya.

Kedelapan, Golkar adalah pelopor pembaharuan dan pembangunan. Sikap dasar ini membawa Golkar senantiasa mendorong gerakan reformasi secara menyeluruh yang dilaksanakan secara *gradual, incremental* dan konstitusional.

B. Visi dan Misi Partai Golongan Karya

Adapun visi Golkar sebagai berikut:

1. Golkar adalah partai terbuka bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa dan status sosial ekonomi.²⁸
2. Golkar adalah partai mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapa

²⁸ Ibid Hal.82

pun atau pihak manapun. Partai Golkar adalah Partai independen, baik secara struktural maupun kultural.

3. Golkar adalah partai demokratis, Sebagai partai yang demokratis Golkar senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka.
4. Golkar adalah partai moderat, sebagai partai yang moderat Golkar senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrim. Dengan demikian partai Golkar baru mengembangkan sikap non-sekretarian bahkan dapat dikatakan anti sektaria. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.
5. Golkar adalah partai yang solid, sebagai partai yang solid Golkar secara utuh dan kukuh senantiasa mendayagunakan potensi yang dimiliki secara sinergis. Dengan visi ini, Golkar melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih.
6. Golkar adalah partai yang mengakar. Sebagai partai yang mengakar Golkar senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya

tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas azas kolusi dan nepotisme.

7. Golkar adalah partai yang responsif. Sebagai partai yang responsif Golkar senantiasa peka dan tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk memperjuangkan keputusan politik yang bersifat publik dan menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang, suku, etnis, agama, bahasa, aliran dan kebudayaan.

Berdasarkan ketujuh visi baru Partai Golkar tersebut, maka sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian Golkar baru menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menganggap Golkar sebagai mesin pengumpul suara dari pemerintah (*the ruler's party*) seperti dalam paradigma lama. Partai Golkar adalah partai baru yang terus mereformasi dirinya untuk menuju *the ruling party* atau partai yang darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara partai Golkar dengan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat. Rumusan hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif. Dengan gambaran visi baru partai Golkar tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin

bahwa partai Golkar adalah partai yang besar, partai yang kuat, dan partai yang selalu berakar di hatinya rakyat Indonesia.²⁹

2. Misi

Misi Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern yaitu:

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
2. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit sistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat untuk menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik masyarakat.³⁰

²⁹ Ibid. Hal 64

³⁰ Ibid hal 8

C. Gambaran umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan

Setiap partai politik dalam menjalankan kinerja butuh suatu kepengurusan dalam proses pelaksanaan pemilu. Partai Golkar memiliki kepengurusan di tingkat Pusat, provinsi, kab/kota. Di kota Makassar terdapat DPD I partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD II Partai Golkar kota Makassar. Ini dikarenakan di Sulawesi Selatan Partai Golkar memiliki basis massa besar dan sering disebut lumbung Golkar. Hal ini dibenarkan oleh Imam Mujahid:

“ Di Sulsel Partai Golkar adalah partai besar dan dominan oleh karena itu siapapun akan mengharapkan Golkar menjadi partainya dan para penguasa akan mencarinya untuk menambah kekuasaan ”³¹

Untuk membantu pelaksanaan kinerja dari DPP Partai Golkar, maka dibentuk kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan di ketuai oleh Syahrul Yasin Limpo yang terpilih secara aklamasi pada pemilihan ketua DPD I Partai Golkar menggantikan Ilham Arief Sirajuddin yang juga incumbent ketua DPD I Golkar periode lalu. Terpilihnya Syahrul Yasin Limpo sebagai ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2009-2014 tentu diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan bagi partai Golkar

³¹ Wawancara dengan Imam Mujahid ketua tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo 22 Juli 2011 pukul 17.20 wita di Kantor ISPEI

dalam merebut suara 50 % di Sulawesi Selatan yang merupakan lumbung suara Partai Golkar.

D. Musyawarah Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan

A. Persiapan

1. Pembentukan panitia MUSDA provinsi oleh DPD partai Golkar provinsi yang terdiri atas: penanggung jawab, panitia pengarah, dan panitia pelaksana, selambat-lambatnya 10 hari sebelum penyelenggaraan MUSDA Provinsi.
2. Penanggung jawab adalah DPD Provinsi yang bertanggung jawab atas kelancaran terselenggaranya MUSDA Provinsi secara keseluruhan dan mengkoordinasikan panitia pengarah panitia pelaksana³².
3. Tugas panitia pengarah :
 - a. Mempersiapkan rancangan jadwal acara, tata tertib, program kerja provinsi dan keputusan lain yang menjadi kewenangan MUSDA Provinsi.
 - b. Melakukan kegiatan untuk menjamin kelancaran pembahasan materi MUSDA Provinsi dalam komisi-komisi.

³² Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hal 3. Sekretariat Jendral DPP Partai Golkar tahun 2009.

4. Tugas panitia pelaksana :

- a. Melakukan segala usaha dan kegiatan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan MUSDA provinsi.
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk menjamin ketertiban dan keamanan MUSDA Provinsi.

B. Waktu dan Tempat

1. MUSDA Provinsi seluruh Indonesia diselenggarakan antara tanggal 1 November 2009 sampai dengan 30 November 2009, dan melaksanakan paling lama 3 hari.
2. MUSDA provinsi dilangsungkan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
3. Tanggal penyelenggaraan MUSDA Provinsi dikonsultasikan dengan DPP partai Golkar.

C. Peserta dan Peninjau

1. Peserta MUSDA Provinsi, adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur dewan pimpinan pusat
 - b. Dewan pimpinan daerah provinsi

- c. Dewan pimpinan daerah kabupaten/kota
 - d. Unsur pimpinan daerah organisasi sayap provinsi
 - e. Unsur pimpinan daerah ormas pendiri (SOKSI, KOSGRORO 1957, dan ORMAS MKGR) di Provinsi
 - f. Unsur pimpinan daerah ormas yang didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL HIDAYAH dan SATKAR ULAMA) di Provinsi
2. Peninjau MUSDA provinsi, terdiri atas :
- a. Dewan penasehat/ pertimbangan DPD Provinsi
 - b. Unsur pimpinan daerah ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai GOLKAR provinsi
3. Undangan :
- a. Perwakilan Institusi
 - b. Perorangan
4. Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh dewan pimpinan daerah provinsi.

D. Hak suara dan Hak bicara

1. Dalam MUSDA provinsi yang memiliki hak suara dan hak bicara, masing-masing adalah :

- a. Unsur dewan pimpinan pusat memiliki 1 (satu) suara;
- b. Unsur dewan pimpinan daerah kabupaten/ kota masing-masing memiliki 1 (satu) suara
- c. Unsur organisasi sayap provinsi secara bersama-sama
- d. Unsur pimpinan daerah ormas pendiri (SOKSI,KOSGORO 1957,dan ORMAS MKGR) di provinsi secara bersama-sama memiliki 1 (satu) suara;
- e. Unsur pimpinan daerah ormas yang didirikan (AMPI, MDI, HWK, AL-HIDAYAH dan SATKAR AL-ULAMA) di provinsi secara bersama-sama memiliki 1 (satu) suara.

2. Peninjau hanya mempunyai Hak Bicara

E. Pimpinan MUSDA Provinsi

1. Pimpinan MUSDA provinsi dipilih oleh dan dari peserta MUSDA Provinsi
2. Sebelum pimpinan MUSDA provinsi terpilih, maka MUSDA provinsi dipimpin oleh DPD partai GOLKAR provinsi sebagai pimpinan sementara
3. Tugas pimpinan sementara adalah memimpin sidang-sidang MUSDA provinsi untuk menetapkan :
 - a. pengesahan jadwal acara MUSDA provinsi
 - b. Pengesahan tata tertib MUSDA provinsi
4. Pimpinan MUSDA provinsi dipilih berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
5. Komposisi personalia pimpinan MUSDA provinsi berjumlah 5 (lima) orang, yang merupakan pimpinan kolektif, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang sekretaris
 - c. 3 (tiga) orang anggota

6. Personalia Pimpinan MUSDA Provinsi mencerminkan unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang unsur dewan pimpinan pusat
- b. 1 (satu) orang unsur DPD provinsi
- c. 1 (satu) orang unsur DPD kabupaten/ kota
- d. 1 (satu) orang unsur yang mewakili organisasi sayap, serta ormas pendiri yang didirikan partai GOLKAR secara bersama-sama.

7. Tugas Pimpinan MUSDA Provinsi, adalah :

- a. Memimpin musyawarah selama berlangsungnya MUSDA provinsi
- b. Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah.

F. Wewenang

Wewenang MUSDA Provinsi, adalah :

- d. Menetapkan program kerja provinsi
- e. Menilai pertanggungjawaban dewan pimpinan daerah provinsi

- f. Memilih dan menetapkan ketua dewan pimpinan daerah provinsi
- g. Menetapkan dewan pimpinan daerah provinsi
- h. Menetapkan ketua dewan pertimbangan DPD Provinsi
- i. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas wewenangnya.

G. Program Kerja Daerah Provinsi

1. Program kerja daerah provinsi masa bakti 2009-2015 disusun sebagai penjabaran lebih lanjut program umum hasil MUNAS-VIII partai Golkar tahun 2009
2. Program kerja harus merupakan kesinambungan dan pembaharuan kerja dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah setempat (kearifan lokal)

H. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

1. Pemilihan ketua DPD provinsi dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :
 - j. Tahap Pencalonan
 - k. Tahap Penyampaian Visi dan Misi

I. Tahap Pemilihan

2. Personalia pengurus DPD provinsi disusun oleh 5 (lima) orang formatur.
3. Personalia pengurus DPD provinsi sebanyak-banyaknya berjumlah 75 orang, yang akan menjalankan fungsi kepartaian, fungsi elektoral dan fungsi kebijakan.
4. Pengurus DPD provinsi terdiri atas pengurus harian dan pengurus pleno.
5. Disamping pengurus harian, dibentuk biro-biro. Jumlah biro pada DPD provinsi disesuaikan kebutuhan dengan memperlihatkan kebijakan struktur organisasi yang efisien dan efektif
6. Setiap DPD provinsi harus memiliki sekurang-kurangnya 12 biro.
7. Didalam memilih personalia pengurus DPD provinsi harus memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

I. Dewan Pertimbangan

1. Disamping dewan pimpinan daerah provinsi, dibentuk juga dewan pertimbangan DPD provinsi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Ketua dewan pertimbangan DPD provinsi ditetapkan dalam MUSDA provinsi.
3. Susunan dan personalia dewan pertimbangan ditetapkan oleh ketua dewan pertimbangan DPD provinsi bersama ketua dewan pimpinan daerah provinsi selambat-lambatnya 15 hari sesudah MUSDA provinsi.
4. Jumlah anggota dewan pertimbangan DPD provinsi sebanyak-banyaknya 17 orang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama satu bulan lebih. Melalui wawancara mendalam dengan segenap komponen-komponen yang terkait dari anggota partai sampai pada media selaku sosialisator pelaksanaan. Akhirnya penulis mendapatkan hasil wawancara mengenai proses lobi politik yang terjadi pada Musda DPD I partai golkar tahun 2009. Hal ini pun akan diuraikan lebih jauh pada paragraf-paragraf selanjutnya.

Lobi Politik Syahrul Yasin Limpo dalam Musda DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan

Dalam Partai politik elit partai selalu menggunakan mekanisme lobi untuk mendapat kekuasaan, tindakan ini juga dilakukan oleh elit Partai Golkar untuk mendapat kekuasaan tertinggi di Partai baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dimana lobi politik adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk

memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.”³³

Kekalahan Surya Paloh dalam Munas VIII Partai Golkar mengubah konstalasi politik di dapur Golkar secara massif. Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin ikut merasakan kekalahan itu. Sejumlah elite Golkar Sulsel langsung tancap gas mencari jalur keselamatan. Pascamunas, Ilham kembali merajut semangat para pimpinan DPD II Golkar-Sulsel, khususnya yang seperjuangan dengannya dalam munas. Bagi Ilham, kekalahan Surya Paloh adalah ujian ketegaran sekaligus ajang pembuktian karakter aslinya, anak Bugis-Makassar yang teguh pada prinsip taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan.

Dalam beberapa kesempatan tertutup, Ilham mengungkapkan pilihannya mendukung Surya Paloh demi menjalankan komitmen dan sikap kecintaan kepada Golkar. Kekuatan Ilham sebagai Ketua Golkar Sulsel mumpuni terbukti dalam Munas Golkar. Dia membuktikan diri sebagai ketua yang dipanuti kader sehingga meski gelimang materi mengimingi pimpinan DPD II, mereka tetap patuh pada keputusan Ilham sebagai ketua DPD I dalam munas.

³³ Rusly ZA Nasution. Kemampuan Lobi dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global (<http://educare.e-fkipunla.net/>)

Setelah kekalahan Surya Paloh di munas, peta politik di internal Golkar juga berubah, kata Arfandy Idris selaku sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel . Ini momentum awal Syahrul maju untuk menduduki jabatan ketua umum DPD I Partai Golkar. Keberadaan ipar Syahrul, Andi Darussalam Tabussala, sebagai salah satu tim sukses Aburizal Bakri di munas lalu menjadi salah satu celah Syahrul untuk kembali ke politik praktis. Kesuksesan Ical merebut enam hingga tujuh suara milik DPD II Golkar kabupaten/kota Sulsel pada munas lalu menjadi salah satu kekuatan untuk mengalahkan Ilham.

Syahrul Yasin Limpo menyatakan keyakinannya untuk memenangkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel pada tanggal 14-16 November. Dengan posisi sebagai gubernur, wakil pemerintah pusat di daerah, Syahrul yakin DPD II Golkar kabupaten/kota se Sulsel akan memilihnya dibanding calon lain. Syahrul melakukan beberapa pendekatan lobi untuk memenangkan Musda Golkar Sulsel dan memanfaatkan posisinya sebagai Gubernur, hal ini seperti diungkapkan Imam Mujahid:

*“pola struktural lobi adalah pendekatan Gubernur, lewat kepala-kepala dinas dan memberikan penjelasan alasan mengapa Syahrul harus jadi ketua Golkar.”*³⁴

³⁴ Wawancara dengan Imam Mujahid ketua tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo 22 Juli 2011 pukul 17.20 wita di Kantor ISPEI

Ini bukan semata oleh karena Syahrul sendiri melainkan karena dukungan Golkar, Golkar adalah partai yang ingin kekuasaan dan posisi Gubernur yang dipegan oleh Syahrul adalah posisi strategis bagi Golkar.

" Saya tidak mau main klaim-klaim dukungan. Kita lihat saja nanti di musda. Saya guru petarung kok. Saya pilih Golkar bukan karena pemilihan gubernur ke depan," kata Syahrul usai menghadiri sebuah acara di Hotel Clarion, Makassar, Kamis (5/11). ³⁵

Sebelumnya Ilham menegaskan dirinya adalah petarung dan tidak akan mengundurkan diri Golkar kendati pun ada lobi pengurus DPP untuk mundur dari bursa kandidat di musda. Syahrul juga mengatakan yang kemudian dibenarkan oleh A.S Kambi

" bekalnya untuk maju tidak semata-mata mengandalkan dukungan DPP. Saya tidak andalkan dukungan DPP saja. Yang saya andalkan adalah kemampuan saya. Orang-orang DPD II mau nggak saya pimpin? Syahrul kader Golkar yang Anda tidak boleh ragukan kekaderannya. Saya kader Golkar. Golkar mau nggak dipimpin oleh ketua Golkar yang sekaligus gubernur. Itu pertanyaannya. " ³⁶

³⁵ Tribun Timur edisi 9 November 2009

³⁶ Wawancara dengan redaktur bagian politik Tribun Timur A.S Kambi dikantor Tribun Timur pukul 21.00 wita

Tidak hanya dukungan politik yang sudah dikantonginya, mantan Bupati Gowa ini memaparkan gambaran umum visinya jika mengalahkan Ilham. "Kenapa Golkar makin mengalami tantangan-tangan yang cukup besar? Karena selama ini pendekatannya adalah struktural fungsional . Tidak pakai kompetensi. Sekarang kalau kita bicara kompetensi, kasi baku tabrakmi saya punya kompetensi dengan kompetensi calon lain,".Meski Ilham dan Syahrul terlibat rivalitas menjelang musda, hubungan keduanya dalam kapasitas gubernur-wali kota berjalan baik.

Syahrul Yasin Limpo, kandidat Ketua Golkar Sulsel Road Show dan melakukan gerilya politik di daerah utara. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Soppeng, Syahrul singgah di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Soppeng. Syahrul menemui Ketua DPD II Partai Golkar Maros, Andi Nadjamuddin Aminullah di rumah jabatan Bupati Maros. Pertemuan berlangsung tertutup bagi wartawan. Menurut A.S Kambi

*Saat hendak dikonfirmasi mengenai hasil pertemuannya, Syahrul buru-buru naik ke kendaraannya. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pangkep.*³⁷

Syahrul secara khusus menemui Ketua DPD II Partai Golkar Pangkep, Syamsuddin Hamid. Bakal Calon Bupati Pangkep ini bertatap muka dengan Syahrul, Juru bicara Syamsuddin, Rahmat Nur, yang dikonfirmasi mengenai

³⁷ Wawancara dengan redaktur bagian politik Tribun Timur A.S Kambi dikantor Tribun Timur pukul 21.00 wita

hasil pertemuan dengan Syahrul, enggan berkomentar. Di Barru, Syahrul juga bertemu dengan Ketua DPD II Golkar Barru yang juga Bupati Barru. M Roem, rekan sepermainan Syahrul saat masih remaja ini, tidak berkomentar apa-apa mengenai hasil pertemuannya dengan Syahrul. Gerilya Syahrul berakhir di Kabupaten Soppeng. Ia membuka Rapat Kerja Daerah dan Studi Karya Bakti Karang Taruna Tingkat Provinsi Sulsel di Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Soppeng. Lagi-lagi Syahrul bertemu dengan Ketua DPD II Golkar Soppeng Kaswadi Razak. Kaswadi adalah Bakal Calon Bupati Soppeng dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Soppeng.

Syahrul Yasin Limpo terus menggelar manuver politik lima hari menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel, 14 November . Syahrul mengumpulkan ketua-ketua DPD II Golkar kabupaten/kota di Hotel Clarion, Makassar. Dari daftar hadir yang diteken peserta, acara ini dihadiri sembilan ketua DPD II. Masing-masing Tenri Olle Yasin Limpo (Gowa), Zain Katoe (Parepare), Muh Rum (Barru), Najamuddin Aminullah (Maros), Ibrahim Rewa (Takalar), Idris Galigo (Bone), Syamsuddin Hamid (Pangkep), Harta Sanjaya (Soppeng), dan Amping J Situru (Toraja). Selain Gowa, Soppeng, dan Pangkep, ketua DPD II yang hadir juga merangkap kepala daerah/wali kota. Ketua DPD II yang lain diwakili pengurusnya. Jeneponto diwakili Azhari Radjamilo dan Sekretaris DPD II Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso juga

hadir. Demikian juga Pinrang mengutus bendaharanya terlihat hadir di Clarion.

Silaturahmi ini sekaligus meminta ijin kepada ketua-ketua DPD II untuk maju sebagai bakal calon. Saya harap DPD II menerima saya sebagai kader. Golkar adalah bagian infrastruktur politik yang sangat luas dan kuat di Sulsel," kata Syahrul saat konferensi pers juga menambahkan bahwa kompetisi adalah hal normatif.

Arfandi mengaku susah membayangkan suasana musda jika tidak ada kompromi antara Syahrul-Ilham tidak mencapai kompromi politik sebelum palu musda diketuk. Menurutnya keduanya adalah politisi sejati. Punya pengalaman dan sama-sama memiliki pendukung fanatik, ujar mantan Ketua DPD I KNPI Sulsel tersebut .

Sejak genderang perang Ilham-Syahrul ditabuh, gerbong politik Golkar Sulsel terbongkar. Sejumlah pihak pun berupaya mendamaikan keduanya. Meski belum ada penyampaian ke publik perihal telah tercapainya kompromi di antara mereka, namun kader beringin berharap kompromi itu tetap ada. Minimal menjelang musda, saat injury time. Kompromi batal, artinya panitia akan kerja ekstra. Minimal menyelamatkan musda agar tidak berdarah-darah.

Ini tersirat dari ungkapan M.Zain Katoe bahwa ada keinginan untuk menghindari perpecahan di partai Golkar:³⁸

“yang sibuk melobi DPD II pemilik suara justru DPP, utamanya Nordin Halid dan Idrus Marham dalam rangka mengamankan keinginan ketua umum Aburizal bakrie agar Syahrul yang jadi ketua DPD I partai Golkar Sulsel.”

Senior Golkar pun memiliki pekerjaan lebih besar untuk menyelamatkan biduk Golkar Sulsel dari keretakan jika kompromi itu gagal. Menurut A.S Kambi;

*"Kalau Pak Ilham hanya memikirkan dirinya sendiri, beliau tidak akan sepusing ini. Tapi beliau memikirkan anggotanya, memikirkan orang-orangnya, utamanya yang ada di 11 kabupaten yang akan pilkada, Sedangkan bagi Syahrul kekalahan dalam musda tanpa kompromi adalah "aib". Kekalahan ini akan menjadi "noda" dalam karier politiknya ke depan".*³⁹

Kemenangan Pak Syahrul adalah harga mati, tegas Wakil Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri TNI (FKPPI) Kota Makassar, Adri Lairing. Bak dikomando, sejumlah elite Golkar Sulsel mendesak Ilham Arief Sirajuddin-

³⁸ Wawancara dengan M.Zain Katoe via telepon pukul 19.00 wita tanggal 6 Agustus 2011

³⁹ Wawancara dengan redaktur bagian politik Tribun Timur A.S Kambi dikantor Tribun Timur pukul 21.00 wita

Syahrul Yasin Limpo melakukan kompromi sebelum agenda pemilihan ketua. Desakan ini disampaikan hingga hitungan jam menjelang pemilihan.

Usulan rekonsiliasi sebelum musda ini pertama kali diungkapkan anggota dewan penasihat Golkar Sulsel Edy Baramuli dan Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris. Tujuannya adalah agar Golkar tetap utuh dan tidak terkotak-kotak. Arfandy mengatakan, keduanya harus bertemu sebelum pemilihan dimulai. Sebab masing-masing memiliki massa yang fanatik sehingga kemungkinan untuk terpecah sangat besar. Hal yang sama juga diungkapkan Edy Baramuli yang menyayangkan jika keduanya harus berseberangan. Ketua DPD Generasi Muda Musyawarah Kerja Gotong Royong (Gema MKGR) Sulsel secara khusus menggelar jumpa pers pada Jumat, 13 November 2009. Intinya, meminta Syahrul-Ilham segera melakukan kompromi. Sebab dikhawatirkan pemilihan ketua pada musda akan melahirkan perpecahan di tubuh Partai Golkar. Kompromistis sebaiknya dilakukan agar tidak ada kandidat yang dcederai. Menurutnya, jika terjadi perpecahan dan salah satunya dcederai, tidak menutup kemungkinan satu di antaranya sulit bekerja untuk rakyat dan bahkan menghilang dari kancah politik. Eddy yang juga Ketua DPD Sentral Organisasi Karyawan

Swadiri Indonesia (SOKSI) Sulsel menyerukan semua pihak untuk berusaha mempertemukan Ilham-Syahrul sebelum palu musda diketuk.⁴⁰

Dalam realitas politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Rumus dalam politik adalah menang dan kalah, artinya semua orang akan berlomba-lomba untuk melakukan berbagai upaya untuk dapat memenangkan sebuah pertarungan politik, pada level apapun dan arena pertarungan politik manapun. Namun menurut Imam Mujahid bagi Syahrul bukan menang atau kalah, tapi tanpa harus mencederai lawan.

“siapapun ingin menang dalam Musda Golkar, tapi Syahrul ingin menang tanpa ada yang merasa di cederai, dan berjalan sesuai mekanisme mufakat.”⁴¹

Musda adalah momen konsolidasi dan akan menjadi penentu kebijakan organisasi untuk berjalan. Misi partai untuk meraih kembali 50 persen suara pada Pemilu 2014. Seperti yang dikatakan oleh Mahyanto Masda:⁴²

“ketua umum Golkar Sulsel yang baru nanti memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan nama besar Golkar di Sulsel.”

⁴⁰ Tribun timur edisi 14 november

⁴¹ Wawancara dengan Imam Mujahid ketua tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo 22 Juli 2011 pukul 17.20 wita di Kantor ISPEI

⁴² Wawancara dengan Mahyanto Masda Ketua Biro Hukum dan Ham partai Golkar Sulsel pukul 10,15 wita tanggal 6 agustus 2011

Ketua baru harus membawa Golkar meraih 50 % suara di Sulsel. Syahrul memilih untuk melakukan mekanisme pemilihan dengan cara mufakat seperti yang sebelumnya disarankan Ketua DPP Golkar Abu Rizal Bakrie, sementara Ilham menginginkan pemilihan dengan cara pemungutan suara. Ini juga seperti yang dikatakan Sugali:⁴³

“ pak Ilham menginginkan voting dalam musda, namun keinginan kuat dari DPP untuk melakukan aklamasi”

Hal senada juga diungkapkan Rahma Pina:⁴⁴

“dalam musda DPD I Partai Golkar Sulsel keinginan Ilham Arief Sirajuddin adalah dengan menggunakan proses voting sehingga terpilih ketua umum Partai Golkar Sulsel”

Namun forum dan ketua DPP partai Golkar menyetujui mekanisme itu adalah aklamasi dan itu dimenangkan oleh Syahrul Yasin Limpo.

Tabel. 3.
Nama pemegang hak suara DPD II

Kota/Kabupaten	Nama	Jabatan
Makasar	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM.	Ketua
Maros	H. A. Nadjamuddin Aminullah,S.Sos	Ketua
Pangkep	H. Syamsuddin A. Hamid, SE.	Ketua
Barru	Drs. H. A. Muhammad Rum	Ketua
Pare-pare	Drs. H. M. Zain Katoe	Ketua
Pinrang	H. Andi Renreng Palalloi	Ketua
Sidrap	H. Andi Ranggong	Ketua

⁴³ Wawancara dengan Sugali juru bicara tim pemenang Ilham Arief Sirajuddin pukul 14.00 wita 6 agustus 2011

⁴⁴ Wawancara dengan Rahma Pina Ketua Tim Pemenangan Ilham Arief Sirajuddin via telepon pukul 14.37 wita 6 agustus 2011

Enrekang	Ir. H. La Tinro La Tunrung	Ketua
Tana Toraja	Jonathan Waco Salisi, SH.	Ketua
Luwu	Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd.	Ketua
Palopo	Drs. H. Saruman	Ketua
Luwu Utara	H. Arsyad Kasmar	Ketua
Luwu Timur	H. Andi Hasan	Ketua
Bone	H. A. Muh. Idris Galigo, SH.	Ketua
Sopeng	Drs. H. A. Harta Sanjaya	Ketua
Wajo	H. Andi Asmidin	Ketua
Gowa	Hj. Tenri Olle Yasin Limpo	Ketua
Takalar	DR. H. Ibrahim Rewa, MM	Ketua
Jeneponto	Drs. H. Radjamilo	Ketua
Bantaeng	H. Budi Santoso, S.Sos.	ketua
Bulukumba	Drs. A. Muttamar Mattotorang	Ketua
Sinjai	Massalinri Lathief	Ketua
Selayar	H. Ince Langke IA, S.Pd.	Ketua

Sumber.Data Sekertariat Partai Golkar

Berbicara mengenai kepentingan, semua berujung pada kepentingan individu dan kepentingan partai/ organisasi, Individu yang menjalankan proses ini adalah seseorang yang memiliki kepentingan, Syahrul Yasin Limpo adalah Gubernur Sulawesi Selatan dan juga ketua DPD I partai Golkar. Pada Musda Golkar telah ditentukan bahwa calon kepala daerah yang diusung partai Golkar harus memiliki kontrak politik dengan DPD I, dimana dalam hal ini setiap calon kepala daerah harus bisa sejalan dan memiliki visi dan misi yang sama dengan DPD I partai Golkar yaitu bisa mendapat suara sebanyak-banyaknya pada pemilu yang akan datang, seperti yang diutarakan oleh bapak Arfandi Idris yaitu :

"Inikan organisasi politik yang dilakukan karena kepentingan politik, sinergitas antara pak Syahrul dan ketua-ketua DPD II melakukan komunikasi yang intens, dengan ketua DPD II menghendaki agar kepemimpinan Golkar Sul-Sel bisa tercermin nanti, bisa terlihat sejauh mana kebersamaan yang dipimpin oleh pak Syahrul bisa mencapai hasil di pemilu 2014 nanti".⁴⁵

Dari wawancara dengan wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan penulis beranggapan bahwa musyawarah mufakat itu bagian dari proses demokrasi, voting bukan satu-satunya dari proses demokratisasi, musyawarah mufakat juga bagian dari proses demokratisasi.

Syahrul Yasin Limpo tidak menginginkan pemilihan secara voting dan lebih memilih agar Pemilihan ketua melalui musyawarah mufakat. Menurut Syahrul, jika lewat voting, maka dirinya yang akan memilih mundur dengan alasan tidak mau ada yang tercederai dalam musda ke-VIII kali ini. Seperti yang diungkapkan Syahrul dihadapan peserta musda:

"Saya dengan Ilham itu tak terpisahkan. Dan saya lebih baik mundur, jika memang harus melalui voting"⁴⁶

⁴⁵ Wawancara langsung Arfandi Idris pukul 11.00 pada tanggal 24 juni 2011

⁴⁶ Syahrul Yasin Limpo pimpin Golkar Sulsel http://politik.vivanews.com/news/read/105886-syahrul_yasin_limpo_pimpin_golkar_sulsel

Proses pemilihan Ketua Golkar Sulsel yang digelar di Hotel Imperial Aryaduta Makassar berlangsung alot. Hingga pada akhirnya di ambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dengan kesepakatan, Syahrul menjadi Ketua dan Ilham tetap masuk dalam kepengurusan. Ini benarkan oleh Imam Mujahid:

“pak Syahrul akhirnya terpilih, dan Ilham menjadi wakil ketua, namun beberapa waktu ia melihat peluang di Demokrat maka ia memilih untuk ke Demokrat”⁴⁷

Syahrul Yasin Limpo akhirnya terpilih menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulsel, pada Musda ke-VII. Syahrul, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, menggantikan Ilham Arief Sirajuddin, untuk periode 2009-2014, setelah disepakati untuk dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Dari paparan data tersebut dapat dikatakan bahwa relevan dengan Teori yang di paparkan sebelumnya. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginan pelaku. Benar dilakukan oleh Syahrul dalam Musda DPD I Golkar dimana keinginannya untuk melakukan aklamasi dalam Musda diikuti dan disepakati hingga Ia terpilih menjadi Ketua

⁴⁷ Wawancara dengan Imam Mujahid ketua tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo 22 Juli 2011 pukul 17.20 wita di Kantor ISPEI

umum Partai Golkar Sulsel. Begitupun dengan Lobi Politik, Definisi Lobi dapat disusun sebagai “Suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai”.

Syahrul melakukan manuver politik dengan menggunakan Lobi melalui pendekatan kekuasaan jabatan Gubernur, dan memainkan komunikasi politik dengan sangat baik. Sehingga dalam Musda DPD I Golkar Sulsel proses aklamasi pun dilakukan sesuai keinginannya dan membawa dia menjadi ketua umum partai Golkar Sulsel.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Musda Golkar ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kekuatan mesin politik Golkar Sulawesi Selatan yang dapat dikendalikan secara profesional oleh pemimpin yang berpengaruh dan memiliki jaringan yang luas. Suhu politik menjelang musyawarah daerah DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan memanas, ketika salah satu calon kuat ketua Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyatakan tekadnya maju dalam pencalonan. Kesiapan Syahrul itu disebabkan oleh sebagian besar ketua DPD II menyatakan dukungannya kepada Syahrul untuk menjadi ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan.

Selain itu, sebelum mencalonkan diri sebagai calon ketua Syahrul Yasin Limpo kerap melakukan lobi politik untuk mendapat dukungan dari DPP dan DPD II yang memiliki hak suara, hal ini bukanlah sesuatu yang rumit karena selain kapasitasnya selaku Gubernur rival politiknya dalam Musda juga kurang mendapat dukungan dari ketua umum Partai Golkar karena dalam Munas sebelumnya bersebrangan dengan ketua umum terpilih,

hal inilah yang semakin memperkuat Syahrul Yasin Limpo untuk memenangkan Musda DPD I Partai Golkar.

B. Saran

Menurut penulis proses dalam melaksanakan pemilihan ketua DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan mendatang proses ini bisa diciptakan sebagai wujud kedewasaan berpolitik tanpa harus banyak yang tercederai. Bisa dibayangkan apabila proses pemilihan sampai voting, ini memungkinkan perpecahan terjadi dalam internal partai dan pertarungan bisa berdarah-darah. Mekanisme aklamasi yang dipilih sebagai salah satu bentuk kedewasaan berpolitik dimana menghindari terjadinya perpecahan di internal partai Golkar namun hal itu harus sesuai dengan aturan partai yang merujuk kepada Juklak, tata tertib, AD ART, serta kebijakan dari ketua DPP partai Golkar.

Daftar Pustaka

- Alan N. Schoonmaker. 1993. *Langkah-langkah Memenangkan Negosiasi*. Jakarta: PIM
- Ardianto, Juri F. 1999. *Transisi Demokrasi*. Jakarta: KIPP
- Bailusy, M. Kausar. 2001. *Teori Politik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cangara,Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efendy. Onong Uchjana. 1984. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya
- Helena, olii. 2007. *Opini Publik*. Jakarta: Indeks
- Lexy J. Moleong. 2005.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator dan Pesan Politik*. Bandung: Remaja Karya
- _____. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Karya
- Nasution, Zulkareimen. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahman, Abdul. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Saeful Muhtadi, Asep. 2006. *Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: RosdaKarya
- Severin J. Werner.dkk. 2005.*Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa, edisi kelima*. Jakarta: Prenada Media

Surbakti, A. Ramlan. 1984. *Pengantar Ilmu Politik*. Surabaya : Lembaga Penerbitan Universitas Airlangga

Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Yeremi G. Thorn. 1995. *Terampil Bernegosiasi*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo

Literatur Lainnya

Armin, Arsyad. 2006, *Diktat pengantar ilmu politik*, Makassar, Unhas.

Armin, Arsyad. 2007, *Makalah Komunikasi dan Perilaku Politik*.

Rusly ZA Nasution. *Kemampuan Lobi dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global*(http://educare.efkipunla.net/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=7) diakses 20 Maret 2011, Pukul 17.36 Wita.

AsmRomli. *Pengertian Komunikasi Politik*. (<http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/>) diakses 20 Maret 2011, Pukul 17.40 Wita.

Ibnu hasan. *Diplomasi, Lobi dan negosiasi*. (<http://zoffmuttaqien.blogspot.com/2011/01/diplomasi-lobi-dan-negosiasi.html?zx=1e663be3a969e99b>) diakses 20 Maret 2011 pukul 19.25 Wita

Syamsulbahrun. *Membangun Koalisi Antara Lobi Dan Hobi Politik*. (<http://syamsulbahrum.web.id/?p=1432>). diakses 20 Maret 2011 pukul 19.30 Wita

Seta basri. *Komunikasi politik* (<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/komunikasi-politik.html>). diakses 20 Maret 2011 pukul 19.35 Wita

<http://chairulums.wordpress.com/2009/07/01/komunikasi-politik-power-dan-authority/> diakses 20 Maret 2011 pukul 19.40 Wita

http://cangkang.vivanews.com/timnas/news/read/105886-syahrul_yasin_limpo_pimpin_golkar_sulsel diakses 20 Maret 2011 pukul 19.42 Wita